

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdullah, Rozali, 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adji, Oemar Seno, 1996. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta : Simposium UI.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *Negara Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Busro, Abubakar dan Abu Daud Busroh, 1985. *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Djohermansyah, Djohan, 1990. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cetakan I Jakarta : Bumi Aksara.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harahap, Zairin, 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Hasyimzoem, Yusnani dkk, 2017. *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Indroharto, 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 april 1959 dan No. I/1962 menginstrusikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.
- Marbun, S.F., 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Hadjon, Philipus, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu : Surabaya.
- Muslimin, Amrah, 1978. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, Alumni.
- Nazir, Moh, 2006. *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Riawan Tjandra, W., 2003. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Situmorang Victor dan Soediby, 1992. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soetami, A. Siti, S.H. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Redika Aditama.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Ubedilah, dkk, 2000. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta , Indonesia Center for Civic Education.
- Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wijoyo, Suparto. 2005. *Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wiyono, R., 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Sinar

Grafika.

Yuslim, 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Rudiadi, Ratna Herawati, 2017, *Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 13, Nomor 1.

Saleh, Ahmad, 2013. *Peran Serta Masyarakat di DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2.

Wanco Marne, Abdul Halil Ibrahim, 2019. “*Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan*”, Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol 1 No 2.

Musdar, 2019. “*Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Legal Analysis of the Dispute of Village Head Selection in Kolaka District*”, Halu Oleo Legal Research, Vol. 1 Issue. 1.

Widjaja, Alia Harumdani, 2017. “*Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa The Implications of The Constitutionality of The Regulation of Domicile Requirements for The Candidate Head of The Village*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/G/2017/PTUN-PBR